

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Bella Riskyanda Novandhani

NPP. 32.0801

*Asdaf Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email : 32.0801@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Irfan Setiawan, S.IP M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The problem of waste management in Tarakan City has become a strategic issue with the increasing population and volume of waste that is not comparable to the management capacity. Purpose:* *The purpose of this study is to analyze the collaborative process in waste management in Tarakan City. Method:* *This research uses descriptive Qualitative Research Methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. Results:* *The results show that although there are significant collaborative efforts in the formation of Community Self-Help Groups (KSM), TPS3R, and Waste Bank initiatives that have increased community participation, there are still major obstacles such as limited human resources, especially related to the low level of awareness and concern of the community about the importance of proper and good waste management and inadequate infrastructure. Thus, increased commitment and coordination are still needed to achieve more optimal results. Conclusion:* *The application of collaborative governance in waste management in Tarakan City has provided positive changes, but still requires strengthening in institutional aspects, facilitative leadership, and increasing the capacity of the community and waste management actors to achieve an inclusive and sustainable management system.*

Keywords: *Collaborative Governance, Waste Management, Tarakan City*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tarakan menjadi isu strategis dengan meningkatnya jumlah penduduk dan volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan. Tujuan:* *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota Tarakan. Metode:* *Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan:* *Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya kolaboratif yang signifikan dalam Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), TPS3R, dan inisiatif Bank Sampah telah meningkatkan partisipasi masyarakat, namun masih terdapat kendala*

utama seperti keterbatasan sumber daya manusia terutama terkait rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan baik serta sarana prasarana yang kurang memadai. Sehingga masih diperlukan peningkatan komitmen dan koordinasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. **Kesimpulan:** Penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Tarakan telah memberikan perubahan positif, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku pengelola sampah untuk mencapai sistem pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan Sampah, Kota Tarakan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut integrasi teknologi di semua sektor, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah menyadari bahwa dalam menghadapi tantangan yang kompleks, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti sampah, tidak dapat berjalan sendiri. Batista et al (2021) dalam He et al (2024) mengungkapkan bahwa “The engagement of diverse stakeholders is essential for holistic and comprehensive waste management approaches. It ensures that the perspectives and interests of all relevant parties are considered, leading to more inclusive, equitable, and effective solutions.”. Sehingga keterlibatan berbagai pemangku kepentingan merupakan aspek krusial dalam pendekatan pengelolaan limbah dan sampah, karena memungkinkan integrasi kepentingan dan perspektif yang beragam karena sampah merupakan permasalahan global yang semakin kompleks, termasuk di Indonesia.

Menurut Emerson et al (2012) mengemukakan bahwa “*as the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished*”. Maksudnya bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan para pelaku yang secara konstruktif berasal dari berbagai tingkatan, baik tataran pemerintahan, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam hal mencapai tujuan publik yang tidak dapat diselesaikan apabila dilaksanakan hanya sepihak saja.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 2023 volume timbulan sampah nasional mencapai 40,116,855.37 juta ton. Sementara itu, Kota Tarakan menyumbang sekitar 154 ton perhari dan hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir atau TPA yaitu di TPA Aki Babu yang pada tahun 2024 ini sudah kelebihan beban dalam menampung sampah. *The waste crisis presents a complex challenge that requires diverse stakeholder engagement for efficient and lasting solutions* (Valentina et al., 2025)

Khanal et al (2023) dalam Harry Mulya Zein et al (2024) mengungkapkan bahwa kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan merupakan komponen penting dari teknik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu,

kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah sangat dibutuhkan guna menciptakan sistem pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan sesuai prinsip good governance. Hal ini juga sejalan dengan pemerintahan yang sebenarnya dalam pandangan Muhadam Labolo adalah usaha untuk hidup bersama secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan bersama termasuk tindakan (dinamika), organisasi fungsional, serta tanggung jawab dan wewenang, dapat digunakan untuk melihat tata kelola (Mustanir, 2023).

Kota Tarakan dengan luas 65.733 Hektar adalah satu satunya kota di Kalimantan Utara, Kota Tarakan tercatat di tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sekitar 249.960 jiwa. Saat ini, Kota Tarakan menghadapi tantangan serius salah satunya dalam pengelolaan sampah seiring meningkatnya jumlah penduduk yang tergolong cepat dan urbanisasi yang menyebabkan volume sampah terus bertambah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Falaq Al Amin et al (2023) *Urban areas face severe environmental problems, where rapid population growth causes the amount of waste in urban areas to increase*". Keterbatasan sarana prasarana, seperti terbatasnya daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA), rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya pemilahan dan pengolahan sampah menjadi juga memperparah situasi. Berbagai program seperti TPS3R, Bank Sampah, Sampah "SEMESTA" dan regulasi daerah telah diimplementasikan dengan cukup baik, namun pencapaiannya masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan partisipasi publik yang kurang.

Menurut Setiawan (2018) yang menjelaskan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya . Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kota Tarakan menerapkan kebijakan berupa pendekatan *collaborative governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Melalui program seperti "Sampah Semesta" dan pembangunan TPA Juata Krikil dengan sistem sanitary landfill, upaya pengelolaan sampah diarahkan pada pola yang lebih sistematis, partisipatif, dan berorientasi keberlanjutan. Meskipun demikian, penguatan kelembagaan, edukasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi tercapainya pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan efisien.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kota Tarakan menunjukkan perhatiannya terhadap lingkungan masyarakat melalui Visi Pemerintah Kota Tarakan yang menyatakan tujuan dengan Moto Kota Tarakan, yaitu BAIS (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera). Dimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertanggung jawab untuk mengelola, mengurangi, serta menangani sampah yang menjadi kewenangan daerah.

Namun pada kenyataannya dari data dokumen perubahan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, program pengelolaan sampah itu meliputi sub kegiatan pengurangan dan penanganan, pada sub bagian penanganan sampah masih sangat jauh melampaui dari persentase maksimal yang diharapkan karena seharusnya tren persentase sampah menurun. Ada kelebihan 8,03% dari ambang batas target yang seharusnya ditekan ke angka 72% sebagai acuan akhir renstra. Sehingga capaian kinerja terhadap target dalam hal penanganan sampah tahun 2023 hanya berada di angka 88,84%. Dan capaian terhadap target akhir renstra berada di angka 85,67%. Sedangkan pada sub kegiatan pengurangan sampah di Kota Tarakan persentase pengurangan sampah Kota Tarakan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga 2023. Bertambahnya unit TPS3R dan Bank Sampah yang beroperasi meningkatkan angka pengurangan sampah menjadi 17,63 % di tahun 2023 yang sebelumnya di tahun 2021 berada di angka 14,27% dan di tahun 2022 di angka 15,28%. Namun pencapaian di tahun 2023 ini masih jauh dari target yang direncanakan sebesar 27%.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi volume dan berat sampah Kota Tarakan

NO	BULAN	VOLUME (m3)	BERAT (Ton)
1	Januari	18.609	4.652,3
2	Februari	16.318	4.079,6
3	Maret	18.779	4.697,9
4	April	19.430	4.857,5
5	Mei	19.942	4.985,6
6	Juni	18.348	4.588,6
7	Juli	19.019	4.754,8
8	Agustus	19.487	4.872,4
9	September	17.598	4.399,5
10	Oktober	18.978	4.744,5
11	November	18.955	4.739,0
12	Desember	20.304	5.076,0
	TOTAL		56.447,4

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DLH Kota Tarakan, 2023

Selanjutnya Persentase residu sampah yang tinggi dari TPS3R yang menumpuk seperti dalam tabel diatas dikarenakan sampah tidak diolah secara maksimal. Dimana pada data rekapitulasi volume dan berat sampah kota tarakan menurut data laporan kinerja instansi pemerintahan DLH tahun 2023 menunjukkan sampah yang terangkut hingga ke areal TPA Aki Babu masih banyak sampah yang belum terpilah dan disetiap bulannya bukan menurun namun volume dan beratnya malah melonjak sehingga membuat/menyebabkan TPU aki babu tidak sanggup lagi

menampung sampah. Selain itu kebiasaan negatif masyarakat yang belum berubah juga menjadi masalah tambahan, masyarakat kota masih banyak yang tidak melakukan pemilahan sampah dari sumbernya dan juga masih membuang sampah di sembarang tempat serta belum optimalnya penyampaian informasi pengelolaan lingkungan hidup kepada publik/masyarakat seperti mengenai cara menggunakan kembali, mendaur ulang sampah, dan mengurangi sampah .

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh La Ode Al Ihlas (2021) berjudul *Pengelolaan sampah dalam perpektif collaborative governance di Kabupaten Buton Utara* menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Buton Utara masih belum maksimal yang nampak pada teknik pengelolaan sampah dengan menggunakan pola kumpul, angkut, buang, dan belum ada upaya pemilahan dari sumber timbulan sampah. Selain itu pengelolaan sampah masih terpusat pada DLH sebagai regulator dan eksekutor dan belum ada keterlibatan masyarakat dan pihak lain dalam pengelolaan sampah. Persamaan penelitian La Ode Al Ihlas dengan penelitian ini adalah meneliti tentang kolaborasi pemerintahan dalam proses pengelolaan sampah dengan memerhatikan pola kemitraan pemerintah, civil Society, dan swasta dalam program pengelolaan sampah namun penelitian yang dilaksanakan oleh La Ode Al Ihsan lebih mengeksplorasi dimensi- dimensi kunci seperti konteks sistem, penggerak, dinamika kolaborasi, tindakan, serta dampak dan adaptasi, serta teknik survei.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Elena (2021) berjudul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare* menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare dapat dikatakan belum berjalan maksimal dari segi masyarakatnya karena masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan pengurangan sampah sedangkan dari segi penanganan sampah, Pemerintah Kelurahan Labukkang sudah melakukan dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan namun belum sampai ke tahap pemrosesan akhir. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah meneliti tentang penerapan kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu mempunyai fokus penelitian tentang bagaimana Penerapan kebijakan dalam pengelolaan sampah di kelurahan Labukkang Kota Parepare sedangkan penelitian ini berfokus terhadap penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di kota Tarakan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pundenswari et al (2023) berjudul *Green Economy Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Garut* menunjukkan bahwa dimensi dalam proses kolaborasi dalam

dialog antar muka sudah dilakukan oleh DLH bersama stakeholder dengan membangun kepercayaan yang sudah dijalin oleh pemerintah yaitu dengan membuat sesuai dengan Peraturan Bupati Garut tentang Strategi dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, maka dilaksanakan Program Kang Raling dan Puding dalam Pengelolaan Sampah Rumah. Saat ini DLH tengah berupaya keras untuk membina sebagian masyarakat dari enam kecamatan, namun masih terdapat ketidaksepahaman yang jelas tentang tujuan bersama antara DLH dan pemangku kepentingan terkait karena perbedaan perspektif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang telah dibentuk oleh para ahli DLH telah mampu mengelola sampahnya sendiri. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah meneliti tentang kolaborasi pemerintahan dalam proses pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian juga sama sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah lokus penelitiannya dan juga penelitian terdahulu menekankan multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Khairul Amri (2023) berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru* menunjukkan bahwa Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan sampah (Bank Sampah Pusat) tidak berjalan dengan maksimal. Dari ketiga indikator ini, hanya pembagian akuntabilitas yang dapat berjalan cukup maksimal karena implementasinya sesuai dengan peraturan yang telah ada, namun masih belum dapat membuat kolaborasi yang lebih efektif dan maksimal, karena hanya sebagian dari *stakeholder* yang berkomitmen dalam pelaksanaan *Collaborative Governance*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah meneliti tentang kolaborasi pemerintahan dalam proses pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian juga sama sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian Khairul Amri dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh mildayati (2021) berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa* menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan sampah pada tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa Tidak Efektif dimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah tingkat RW di Kelurahan Mamasa yaitu fasilitas, kesadaran masyarakat, peraturan/regulasi, sanksi & pengawasan, sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun perbedaannya ialah lokus penelitiannya dan juga penelitian terdahulu menekankan kepada partisipasi masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan lebih menekankan kepada kebijakan penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan masalah sampah.

1.4 pernyataan kebaruan ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ihlas, 2021; Elene, 2021; Pundenswari et al, 2023; Amri, 2023; Mildayati, 2021) yang lebih banyak memfokuskan pada peran pemerintah atau hanya pada partisipasi masyarakat dalam aspek teknis, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang difokuskan pada proses tata kolaborasi pemerintah berdasarkan teori *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash (2008) dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Tarakan dengan menggabungkan pendekatan partisipatif berbasis komunitas (KSM, Bank Sampah, TPS3R), kebijakan daerah yang terkini, serta transisi sistem pengelolaan dari *open dumping* menuju *sanitary landfill*.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *collaborative governance* dalam hal pengelolaan sampah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dianggap sesuai serta mampu menekankan pada pemahaman yang mendalam dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun menurut Simangunsong (2017) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif dianggap sebagai penelitian partisipatif dimana desain penelitiannya bersifat fleksibel sehingga dapat berubah agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dengan fenomena yang terjadi di lokasi penulis sebenarnya.

Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan fakta-fakta di lapangan berdasarkan data yang diperoleh, yang selanjutnya dianalisis dalam bentuk teori, konsep, dan studi kasus yang kemudian dipertajam dengan pisau analisis yang sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2008) yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana wawancara dilaksanakan terhadap 19 orang informan kunci berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang pengelolaan sampah & B3, kepala seksi pengurangan dan penanganan sampah, camat, ketua KSM, petugas pengangkut sampah, pimpinan cabang Comrel and CID PT. Pertamina EP, serta masyarakat. Kemudian observasi dilakukan dengan ikut terlibat dalam kegiatan, dan dokumentasi tertulis serta visual guna memperkuat temuan yang relevan yang dilaksanakan selama penelitian 21 hari di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan Sampah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

Produksi sampah yang cukup meningkat di Kota Tarakan mendorong pemerintah Kota untuk selalu berinovasi seiring dengan aktivitas dan dinamika

kehidupan masyarakat yang bergantung dengan satu TPA eksisting yang beroperasi yaitu TPA Aki Babu. Pada tahun 2020, kondisi TPA Aki Babu telah mengalami *over capacity* sehingga operasional TPA tidak optimal. Rata-rata total sampah terangkut ke TPA Aki Babu pada 2024 mencapai 154 ton perharinya. Oleh karena itu, TPA baru perlu direncanakan dan dibangun agar mampu menampung dan mengolah sampah dalam jangka panjang.

Pengelolaan sampah dan kebersihan juga harus mutlak dilakukan oleh masyarakat. Pada pasal 7 huruf B Peraturan Daerah Kota Tarakan No.5 Tahun 2014 berbunyi “setiap orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah”. Sehingga pada 2016 Pemerintah Kota Tarakan khususnya di Dinas Lingkungan Hidup, terus berusaha memberikan inovasi terbaru, dimana diharapkan masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah khususnya dalam mengatasi masalah sampah dengan mendukung program pemerintah Kota Tarakan, yakni Program Sampah “Semesta” (Semua Mesti Terlibat) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Saat ini, Kota Tarakan memiliki 14 transfer depo dan 17 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang tersebar di 20 kelurahan. Namun, keterbatasan lahan milik pemerintah kota menjadi kendala utama dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah. Sebagai solusi, pemerintah mengupayakan pembebasan atau pembelian lahan, serta mengusulkan skema pelayanan bersama antarkelurahan melalui pemanfaatan fasilitas TPS3R atau transfer depo yang telah tersedia di wilayah lain. Untuk kelurahan yang tidak memungkinkan bergabung, disediakan alternatif berupa TPS kontainer dan layanan pengangkutan sampah oleh armada truk. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kondisi lingkungan secara signifikan.

3.2 Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Tarakan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program “sampah semesta” sebagai bentuk inisiatif kolaboratif yang terstruktur sehingga menghasilkan hasil nyata berupa presentase pengurangan sampah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga 2023. Bertambahnya unit TPS3R dan Bank Sampah yang beroperasi meningkatkan angka pengurangan sampah menjadi 17.63 % di tahun 2023 yang sebelumnya di tahun 2021 berada diangka 14.27% dan ditahun 2022 diangka 15.28%. Dalam pelaksanaannya, terdapat 4 (empat) dimensi *collaborative governance* yang dianalisis berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008), yaitu pada dimensi pertama *starting condition* dimana adanya keterbatasan sumber daya manusia yang berbanding terbalik dengan luas wilayah dan penduduk yang harus dilayani.

Sarana dan prasarana yang ada juga seperti kendaraan operasional DLH Kota Tarakan saat ini belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah salah satunya dalam pengelolaan sampah juga didanai dari APBN DAK, APBD Provinsi, APBD Kota Tarakan, dan CSR. Selain itu, dalam proses kolaborasi juga terdapat bentuk penolakan dari masyarakat berupa sifat acuh dalam proses pelaksanaan program bersama maupun dalam penerapan kebijakan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Tarakan mencoba mengatasinya dengan melakukan pengendalian dan banyak sosialisasi untuk membuka pikiran masyarakat mengenai penanganan sampah untuk kebersihan dan keindahan Kota Tarakan kedepannya.

Berikutnya pada dimensi kedua *institutional design*, Dalam upaya menangani permasalahan pengelolaan sampah, langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta seluruh elemen masyarakat. Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara sistematis seluruh tahapan kegiatan pengelolaan sampah, mulai dari proses koordinasi awal, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, hingga evaluasi akhir sebagai bagian dari integrasi program pengelolaan sampah berbasis partisipatif. Pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Tarakan juga didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2014. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan sampah secara sistematis dan akuntabel. Di samping itu, peraturan tersebut juga menjelaskan definisi, prinsip-prinsip dasar pengelolaan sampah, serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selanjutnya pada dimensi ketiga *Facilitative Leadership, collaborative governance* tercermin dari peran aktif Pemerintah. Dengan akses terbuka terhadap informasi, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat mereka tentang kebijakan atau program yang diusulkan atau sedang berlangsung (Sepriano et al., 2023). Pemerintah Kota Tarakan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam menganalisis kondisi dan kebutuhan di lapangan serta masyarakat terkait persoalan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemerintah mengambil inisiatif untuk membangun kemitraan strategis lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), pengelola Bank Sampah, dan komunitas lokal, melalui forum-forum koordinasi dan pertemuan penguatan jaringan kerja sama.

Dimensi keempat ialah *collaborative process yang* merupakan inti dari model kolaborasi. Penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Tarakan menunjukkan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai *leading sector*. Interaksi antar aktor dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan yang dirancang untuk menyinergikan

program-program pengelolaan sampah dengan visi pembangunan daerah. Proses kolaboratif ini ditopang oleh upaya membangun kepercayaan melalui transparansi informasi, komunikasi yang responsif, serta keterbukaan terhadap kritik dan saran. Menurut Sururama & Hazala (2023) Keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai sebuah proses, oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan berbagai tahapan tahapan. Maka dari itu, komitmen terhadap proses terwujud dalam semangat kolektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengurangi volume residu sampah yang dibuang ke TPA Aki Babu. Meskipun DLH telah menjalankan peran kelembagaannya secara optimal, masih ditemukan tantangan dalam menyamakan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif sampah dan pentingnya pengelolaan yang ramah lingkungan. Hasil sementara menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan cukup baik, meskipun diperlukan intensifikasi edukasi untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas secara berkelanjutan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah sebagai upaya mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih dan berkelanjutan di Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* telah berjalan secara cukup baik, yang tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah, serta keberhasilan pembentukan unit TPS3R dan Bank Sampah yang mendukung pengurangan volume sampah secara signifikan. Model kolaborasi ini dianalisis menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi utama, yaitu *starting condition*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Keempat dimensi tersebut menggambarkan dinamika interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi komunitas, dan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi strategi yang relevan dan aplikatif dalam mengatasi kompleksitas permasalahan lingkungan, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan lokal yang partisipatif dalam konteks pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kajian *collaborative governance* dengan melakukan analisis mendalam pada setiap tahapan kolaborasi berdasarkan dimensi dan indikator yang dirumuskan oleh Ansell dan Gash dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Tarakan. Pendekatan ini memberikan kerangka analitis yang sistematis dalam mengevaluasi keterlibatan multipihak, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta dinamika proses kolaboratif yang terjadi di tingkat lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh La Ode Al Ihsan (2021), yang lebih menitikberatkan pada eksplorasi dimensi umum seperti konteks sistem, faktor penggerak, dinamika hubungan antar aktor, serta dampak dan adaptasi dengan menggunakan pendekatan survei, penelitian ini menampilkan kebaruan melalui penguraian lebih rinci dan

terstruktur sesuai dengan model teoretis Ansell dan Gash. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan literatur empiris mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena memperdalam pemahaman terhadap penerapan teori *collaborative governance* secara kontekstual di tingkat pemerintahan daerah.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Elena (2021) yang menganalisis tentang penerapan kebijakan dalam pengelolaan sampah di kelurahan labukkang kota parepare yang menekankan pada kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta tujuannya adalah mengelola sampah dari hulu ke hilir secara efisien dan ramah lingkungan. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang juga menganalisis Program Sampah “Semesta” sebagai salah satu indikator pendukung dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih di Kota Tarakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji indikator utama dalam evaluasi pengelolaan sampah, tetapi juga menekankan pentingnya keberhasilan Program Sampah “Semesta” sebagai faktor strategis yang memengaruhi pencapaian target-target lingkungan hidup yang berkelanjutan di tingkat kota.

Penelitian ini sejalan dengan pernyataan dalam penelitian yang dilakukan oleh Khairul amri (2023) yang menyatakan bahwa kualitas dari kebijakan yang diterapkan memengaruhi bagaimana masyarakat merespon dan ikut berpartisipasi untuk mengelola lingkungan. Selanjutnya, pemahaman aparatur sipil negara dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat membutuhkan kinerja yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien. Namun demikian seringkali terjadi pengelolaan masalah sampah menjadi tidak efektif akibat keterbatasan pemerintah baik dalam insentif, sumber daya, dan sarana prasarana.

Sebagaimana penelitian ini dilakukan, kajian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pundenswari et al. (2023) yang juga membahas mengenai kolaborasi pemerintahan dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan *collaborative governance*. Namun, perbedaan mendasar antara kedua penelitian terletak pada ruang lingkup analisis yang digunakan. Penelitian Pundenswari et al. lebih berfokus pada proses kolaborasi secara umum, tanpa mengelaborasi secara mendalam dimensi-dimensi teoretis yang membentuk kerangka kolaborasi tersebut. Sehingga penelitian ini menyajikan analisis yang lebih sistematis, mendalam, dan kontekstual sesuai dengan kondisi lokal Kota Tarakan. Layaknya penelitian yang dilakukan oleh mildayati (2021) dimana paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, bukan hanya melihat bagaimana pengurangan sampah dikelola secara kolaboratif tetapi juga

dapat dimanfaatkan yang tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tercapainya tujuan program.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah guna mewujudkan lingkungan yang bersih, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan sampah di Kota Tarakan sudah cukup baik namun masih menghadapi tantangan yang kompleks seperti peningkatan volume sampah, keterbatasan anggaran, dan perilaku masyarakat masih perlu diatasi.
2. Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Tarakan sudah cukup baik dalam proses kerjasama yang dilakukan namun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Sehingga menunjukkan meskipun desain institusional dan kemitraan telah berjalan namun pelaksanaan pada dimensi forum komunikasi antar masyarakat belum berjalan optimal.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mustanir, A. A. (2023). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Widina.s
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Wahana Resolusi.
- Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah, S., Riwayati, A., & Indarti, C. F. S. (2023). *Transformasi administrasi publik menghadapi era digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Amri, K. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU). <https://repository.uin-suska.ac.id/68792/>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

- Elena, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/id>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Falaq Al Amin, M. N., Fitri, R. A., & Safira, A. (2023). Collaborative Governance in Waste Management: A Study from Surabaya Smart City Programme. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1275(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1275/1/012035>
- He, Y., Zaremohzzabieh, Z., Rahman, H. A., Ismail, S. N. S., & Bin-Qiang, J. (2024). Applying participatory research in solid waste management: A systematic literature review and evaluation reporting. In *Journal of Infrastructure, Policy and Development* (Vol. 8, Issue 5). EnPress Publisher, LLC. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i5.5072>
- Ihlas, A., Ode, L., Wijaya, A. F., MDA, P. D., & Wike, S. (2021). *Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Collaborative Governance di Kabupaten Buton Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya), <http://repository.ub.ac.id/187800>
- Mildayati, M. (2021). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PADA TINGKAT RW DI KELURAHAN MAMASA KABUPATEN MAMASA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11577/>
- Sururama, R., & Hazala, J. I. (2023). Efektivitas penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 92–112. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3186>
- Pundenswari, P., Raesalat, R., Haliza, S. N., & Sidiq, S. R. (2023). GREEN ECONOMY COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GARUT. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 454-471, <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i3.3344>
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Salsabila, L. (2025). Collaborative Governance in Handling the Waste Crisis: A Systematic Literature Review. In *International Journal of Sustainable Development and Planning* (Vol. 20, Issue 2, pp. 761–770). International Information and

Engineering

Technology

Association.

<https://doi.org/10.18280/ijstdp.200225>

Zein, M. H. M., Mahedar, S. J., & Septiani, S. (2024). Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah: Evaluasi Model Governance di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13893-13905, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14448>

